

TAHUN
ANGGARAN

2024

Pemerintah
Kota Manado



ANDREI ANGOUW
WALIKOTA MANADO

dr. RICHARD SUALANG
WAKIL WALIKOTA MANADO

PERUBAHAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KOTA MANADO**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 900-1-12/B-02/BKAD/1788/2024
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andrei Angouw
Jabatan : Wali Kota Manado
Alamat Kantor : Jl. Balai Kota Nomor 1 Tikala Manado
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Manado
2. a. Nama : Apt. Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes
Jabatan : Ketua DPRD Kota Manado
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 6 Kelurahan Sario Utara
- b. Nama : Mona Claudya Kloer, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Manado
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 6 Kelurahan Sario Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kota Manado dengan Pemerintah Kota Manado untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Manado, 18 September 2024

Pimpinan DPRD Kota Manado
Selaku
PIHAK KEDUA
KETUA,

Wali Kota Manado
Selaku,
PIHAK PERTAMA




ANDREI ANGOUW


Apt. Dra. AALTJE DONDOKAMBEY, M.KES

WAKIL KETUA,


MONA CLAUDYA KLOER, SH, MH

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-28
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-1
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-1
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	V-1
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga.....	V-1
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	VII-2
VIII. PENUTUP.....	VIII-1

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA); (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c) keadaan yang menyebabkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa. Adapun yang dimaksud pada poin (a), yaitu keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat terjadi karena adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Kota Manado TA. 2024, pada perkembangannya ada hal-hal yang mengharuskan Pemerintah Kota untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Salah satu penyesuaian strategis yang perlu dilakukan adalah terkait dengan pendapatan daerah yang perlu disesuaikan. Begitu juga ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 yang wajib ditindaklanjuti dalam APBD TA. 2024, catatan-catatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan APBD TA. 2024. Disamping itu ada berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi indikator makro maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta penyesuaian yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan atas APBD Kota Manado TA. 2024.

Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD TA. 2024. Perlu juga disampaikan, bahwa pada proses penyampaian rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2024 ke DPRD Kota Manado, data yang disajikan dalam dokumen secara utuh mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2024. Dengan

demikian, rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2024 saat itu masih merupakan potret dari substansi Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini selaras dengan amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya menjelaskan bahwa seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD, dan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.

Setelah disampaikan, dibahas, dan disepakati bersama, maka diperoleh rancangan postur anggaran Pemerintah Kota Manado yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Manado TA. 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Kota Manado Tahun Anggaran 2024 dilandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Renca Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di tahun 2024, tidak bisa lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi di tahun 2023 dan dinamika yang mempengaruhi perkiraan target serta prospek maupun tantangan perekonomian di tahun 2024. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah disamping untuk mempercepat pertumbuhan, juga pengembangan pemerataan pembangunan yang seiring upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, disamping menjaga stabilitas dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga produktivitas dan daya saing ekonomi dapat ditingkatkan.

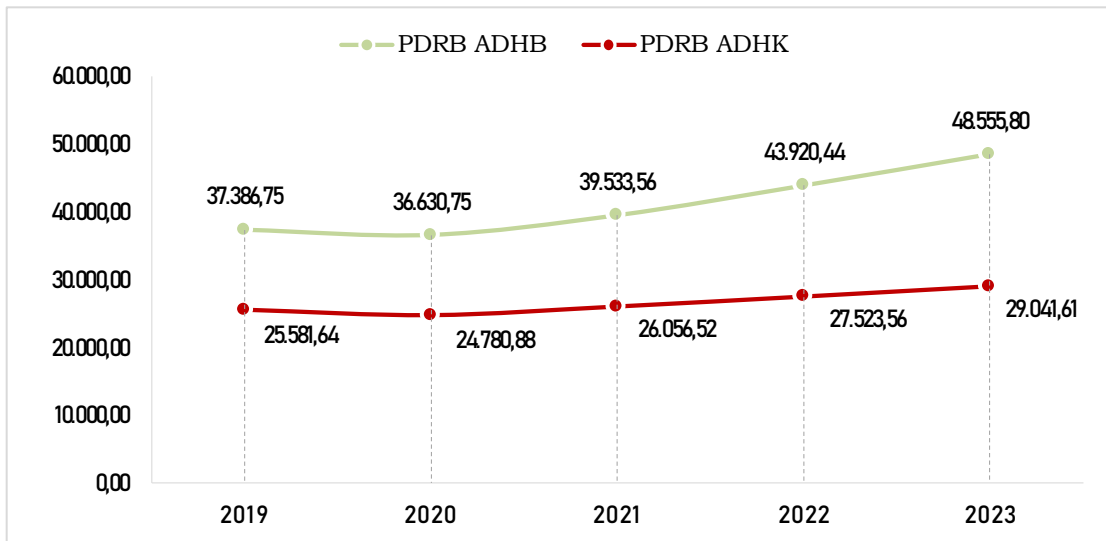
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Manado di tahun 2024 ditujukan untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memastikan suksesnya pelaksanaan pemilu. Perwujudan dari arah kebijakan tersebut diharapkan akan tercermin dari terciptanya kestabilan ekonomi daerah, meningkatnya iklim investasi, semakin terbukanya lapangan pekerjaan, menurunnya kemiskinan, tersedianya pelayanan dasar yang semakin terjangkau dan berkualitas, serta terselenggaranya pemilu secara aman dan damai.

Salah satu indikator utama untuk menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian Kota Manado selang tahun 2019 – 2023 menunjukkan gambaran yang positif di mana – meski sempat terpukul di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 – terus bergerak naik, baik secara nominal maupun secara riil.

Secara nominal, atau lebih dikenal berdasarkan harga berlaku (ADHB), PDRB Kota Manado meningkat dari Rp. 43,92 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 48,55 triliun di tahun 2023. Sedangkan berdasarkan nilai riil, atau lebih dikenal dengan berdasarkan harga konstan (ADHK), PDRB Kota Manado bertumbuh sebesar 5,52% di tahun 2023 di mana terjadi peningkatan nilai PDRB dari Rp. 27,52 triliun di tahun 2022 menjadi Rp. 29,04 triliun di tahun 2023.

Gambar 2.1. PDRB ADHB dan ADHK Kota Manado Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah)



Sumber : BPS Kota Manado

Berdasarkan lapangan usaha, pembentuk PDRB Kota Manado di tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, dengan sumbangan PDRB sektoral sebesar Rp. 10,3 triliun dari total pembentukan PDRB ADHB sebesar Rp. 48,55 triliun, atau sebesar 21,22%. Pembentuk PDRB Kota Manado terbesar kedua adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 19,68%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,96%), dan lapangan usaha Konstruksi (9,31%).

Tabel 2.1 Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,88	1,89	1,95	1,87	1,84
Pertambangan dan Penggalan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Industri Pengolahan	3,25	3,25	3,73	3,72	3,60
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Konstruksi	9,48	9,35	10,11	9,75	9,31
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,39	18,45	20,02	19,89	19,68
Transportasi dan Pergudangan	20,59	19,73	15,22	18,44	21,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,67	5,29	3,95	4,11	4,05
Informasi dan Komunikasi	9,82	9,96	10,92	10,24	9,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	7,73	8,74	8,12	7,43
Real Estate	2,42	2,43	2,39	2,19	2,03

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,26	0,25	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,12	9,57	9,45	8,77	8,21
Jasa Pendidikan	3,36	3,58	3,83	3,59	3,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,25	4,42	5,58	5,42	5,18
Jasa lainnya	3,42	3,88	3,63	3,41	3,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: Manado Dalam Angka 2024

Jika ditinjau dari pertumbuhan secara sektoral, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang paling pesat di tahun 2023, yaitu sebesar 13,99%. Pertumbuhan terpesat kedua dialami oleh lapangan usaha Jasa Lainnya, dengan pertumbuhan sebesar 11,21%, disusul oleh lapangan usaha lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,26%), dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (6,07%). Uraian terkait dengan pertumbuhan sektoral lapangan usaha tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Transportasi dan Pergudangan

Pertumbuhan tertinggi dikontribusi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,99% yang bersumber dari peningkatan jumlah penumpang dan barang pada seluruh aktivitas angkutan dan jasa pengiriman. Pada tahun 2023 terdapat penambahan rute penerbangan Manado-Narita (Jepang) PP oleh Maskapai Garuda Indonesia, serta rute penerbangan China Southern Air yang bertambah dari dua kali seminggu penerbangan menjadi empat kali seminggu. Dampak lain terjadinya peningkatan lapangan usaha ini yaitu meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah dan HBKN Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan MICE dan konsolidasi dalam rangka Pemilu oleh berbagai instansi pemerintah terutama yang berasal dari luar daerah turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan jumlah penumpang udara.

2. Jasa Lainnya

Lapangan usaha Jasa Lainnya meliputi: kesenian, hiburan dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; serta jasa swasta lainnya. Lapangan usaha Jasa Lainnya di urutan kedua sebesar 11,21%. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan pada aktivitas hiburan seperti salon, karaoke, kebugaran dan taman hiburan, adanya pembukaan penerbangan baru pada rute luar

negeri dan meningkatnya wisatawan yang terlihat dari adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara dari 627.039 orang (2022) menjadi 834.619 orang (2023) telah mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini, khususnya rekreasi. Berbagai event seperti Festival Bunaken dan kegiatan konser musik di akhir tahun, serta adanya peningkatan aktivitas partai politik menjelang masa pemilihan umum juga menyumbang pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Jasa Lainnya.

3. Pengadaan Listrik dan Gas

Lancarnya kegiatan di lapangan usaha ini dapat dijadikan salah satu indikator baiknya salah satu kondisi infrastruktur di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan memperbaiki iklim investasi dan mendorong aktivitas produksi. Pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan listrik dan gas pada tahun 2023 sebesar 6,07%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,94%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan pada subkategori Ketenagalistrikan; dan Pengadaan Gas dan Produksi Es pada tahun 2023. Pertumbuhan positif pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas didorong oleh peningkatan produksi dan nilai penjualan listrik pada hampir seluruh segmen pelanggan. Adanya diskon tambah daya listrik oleh PLN dimana pelanggan hanya perlu bayar sekitar seratus tujuh puluh ribu rupiah untuk tambah daya turut mendukung meningkatnya pertumbuhan pada kategori ini.

4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sebelumnya, aktivitas pariwisata di Kota Manado menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini mendorong peningkatan aktivitas beberapa lapangan usaha, salah satunya lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha yang terdiri dari penyediaan akomodasi baik berbintang maupun tidak berbintang serta penyediaan makan minum termasuk diantaranya restoran, kafe, dan kedai ini merupakan lapangan usaha penunjang aktivitas kepariwisataan. Peningkatan pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan turut memberi andil pada peningkatan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,26%) melalui peningkatan tingkat hunian atau tingkat kepadatan hotel dan rumah makan, serta banyaknya pertemuan tatap muka atau MICE yang dilaksanakan di hotel oleh pemerintah, swasta atau family gathering. Peningkatan aktivitas layanan pesan antar makanan yang didaftarkan oleh beberapa rumah makan turut meningkatkan aktivitas pada lapangan usaha ini. Banyaknya acara yang diselenggarakan dalam rangka kampanye oleh beberapa calon legislatif dan eksekutif pada akhir tahun juga turut meningkatkan aktivitas pada lapangan usaha ini.

Secara keseluruhan, pertumbuhan sektoral PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kota Manado adalah sebagai berikut.

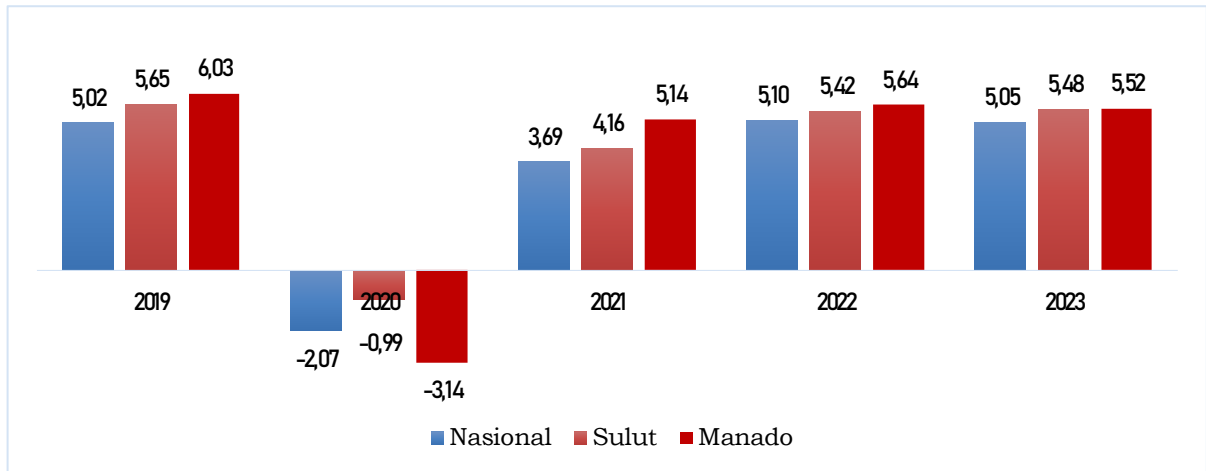
Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Manado Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,4	-0,96	1,72	3,72	5,84
Pertambangan dan Penggalian	7,86	-1,37	3,36	0,17	1,32
Industri Pengolahan	6,08	1,94	7,44	7,79	5,38
Pengadaan Listrik dan Gas	12,62	7,58	8,23	13,57	7,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,66	-1,61	3,15	1,45	0,54
Konstruksi	5,14	-3,45	10,60	4,97	5,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,15	-2,95	5,62	6,13	4,93
Transportasi dan Pergudangan	2,04	-19,02	1,62	18,15	13,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	-30,17	15,73	14,34	6,26
Informasi dan Komunikasi	8,95	12,57	2,24	2,25	3,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,63	5,35	5,62	-3,12	-0,54
Real Estate	6,02	-0,71	0,30	0,46	1,04
Jasa Perusahaan	9,13	-4,62	2,01	2,02	3,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,11	-2,26	2,12	1,15	1,99
Jasa Pendidikan	12,85	4,74	1,83	1,85	5,26
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,79	13,46	8,73	6,52	3,76
Jasa lainnya	15,9	-9,39	3,17	3,18	11,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,03	-3,13	5,14	5,64	5,52

Sumber : BPS Kota Manado, 2024

Secara umum, perekonomian Kota Manado terus bertumbuh positif. Di tahun 2023, perekonomian Kota Manado tumbuh sebesar 5,52%, melambat bila dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 5,64%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Manado senantiasa berada di atas tingkat pertumbuhan Sulawesi Utara dan Indonesia, yang di tahun 2023 masing 5,48% dan 5,05%.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Persen)



Sumber: BPS Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2024

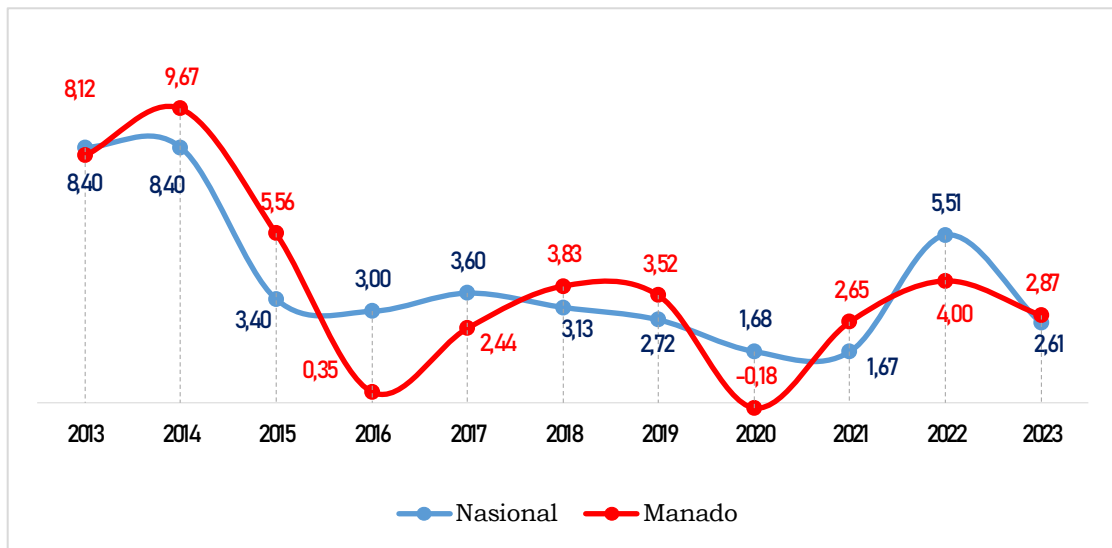
b. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun, yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB per kapita Kota Manado di tahun 2023 adalah Rp. 105,88 juta, meningkat dari Rp. 96,61 juta di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Sulawesi Utara dan Indonesia, PDRB per kapita Kota Manado senantiasa lebih tinggi, di mana di tahun 2023 PDRB per kapita Sulawesi Utara adalah Rp. 64,13 juta dan Indonesia Rp. 75 juta.

c. Inflasi

Inflasi Kota Manado mencatatkan inflasi yang terkendali diangka 2,87%, walaupun lebih tinggi dibanding realisasi inflasi nasional yang berada diangka 2,61%. Inflasi Kota Manado yang terkendali tidak terlepas dari pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong ketersediaan pasokan, salah satunya adalah meredam lonjakan harga cabai rawit yang terjadi pada triwulan IV 2023, sehingga dapat mengalami penurunan di akhir tahun.

Gambar 2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Manado dan Indonesia Tahun 2013– 2023



Sumber: BPS Manado dan Indonesia, 2023

1) Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Inflasi kelompok barang dan jasa pada triwulan IV 2023 terpantau terkendali, ditandai dengan melandainya tekanan inflasi hampir di seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya. Namun penurunan ini tertahan oleh kenaikan tekanan inflasi yang signifikan pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

2) Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami peningkatan, seiring peningkatan inflasi komoditas beras dan cabai rawit, akibat penurunan jumlah produksi di daerah sentra produksi sebagai dampak kemarau yang panjang. Cuaca panas yang mencapai puncaknya pada September 2023 berdampak pada hasil panen cabai rawit serta membuat sejumlah petani cenderung menunda penanaman seiring kekhawatiran akan hasil panen yang kering, sehingga menyebabkan pasokan komoditas tersebut menurun di tengah peningkatan permintaan masyarakat menjelang perayaan HBKN Natal dan Tahun baru.

3) Inflasi Kelompok Transportasi

Secara tahunan, kenaikan inflasi pada kelompok Transportasi di Manado didorong oleh peningkatan harga komoditas angkutan udara, khususnya pada bulan Desember 2023. Kenaikan permintaan menjelang liburan HBKN Natal dan Tahun Baru ditanggapi oleh pasar dengan peningkatan tarif angkutan udara.

4) Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya cenderung meningkat didorong oleh peningkatan inflasi komoditas emas perhiasan. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga emas global yang mengalami kenaikan menjelang akhir tahun.

5) Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya tercatat melandai atau mengalami deflasi 0,03 persen (yoy), disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas bahan bakar rumah tangga.

6) Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

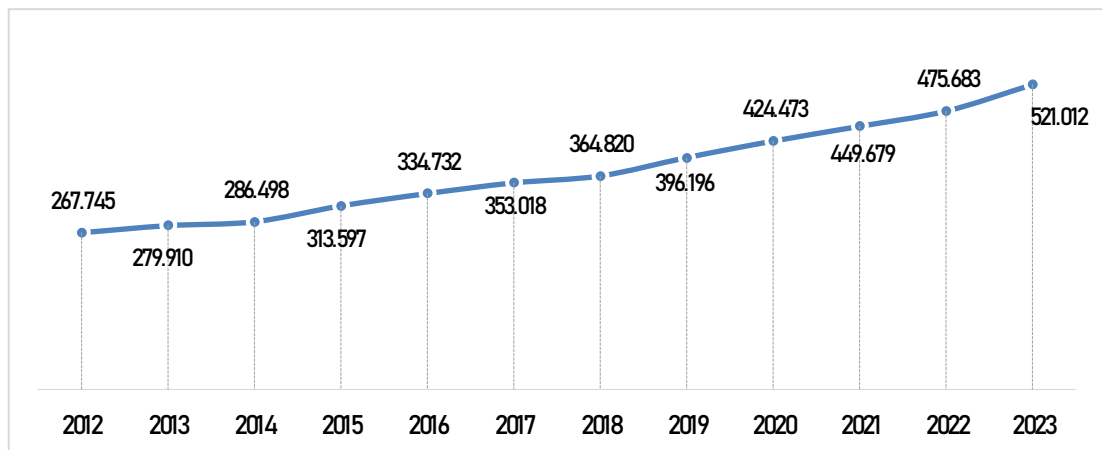
Inflasi kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran di Kota Manado terpantau melandai, didorong oleh sejumlah komoditas pendukung yang mengalami deflasi seperti bawang merah, minyak goreng, tomat, dan komoditas perikanan, serta bahan bakar rumah tangga seperti LPG.

Adapun perkembangan IHK pada enam kelompok pembentuk inflasi lainnya relatif stabil, yaitu Kelompok Pakaian dan Alas Kaki; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kelompok Kesehatan; Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya, dan Kelompok Pendidikan.

d. Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu patokan yang dijadikan dasar penetapan suatu rumah tangga dikategorikan miskin atau tidak miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GKM (Garis Kemiskinan Makanan) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain-lain). Sedangkan GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, yang diwakili oleh 51 jenis komoditi. Perkembangan GK Kota Manado dari tahun 2012-2023 terdapat pada gambar berikut.

Gambar 2.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Manado Tahun 2012-2023
(Rp/Kapita/Bulan)



Sumber: BPS Kota Manado 2024

GK di Kota Manado selama kurun waktu 2012-2023 cenderung mengalami kenaikan, akibat dari perubahan harga barang dan jasa yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Kenaikan garis kemiskinan yang tidak diimbangi dengan pendapatan per kapita merupakan penyebab peningkatan jumlah penduduk miskin.

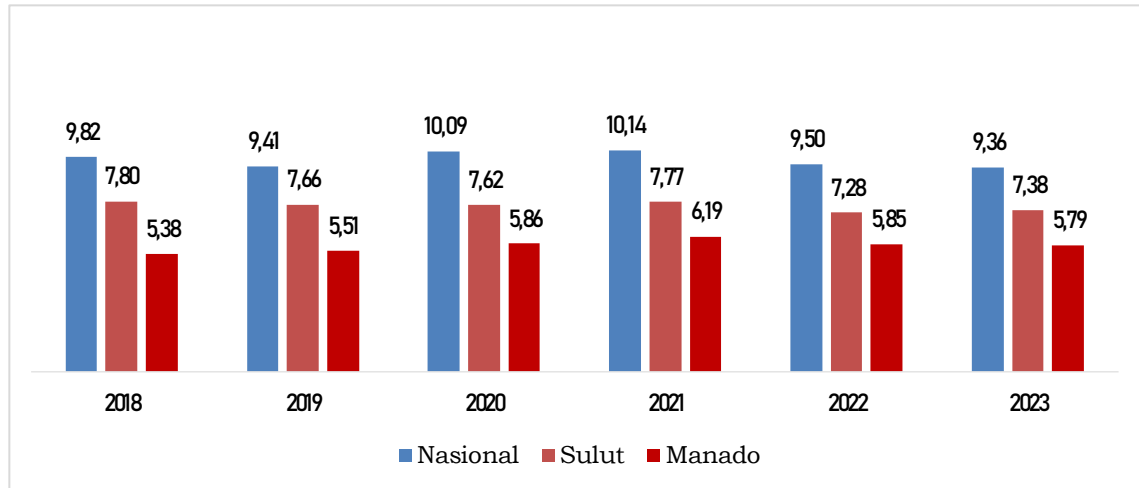
GK Kota Manado tahun 2023 sebesar Rp.521.012 per kapita per bulan. Naik sebesar Rp.45.329 dari tahun 2022 atau hampir dua kali lipat dari kenaikan GK 2021-2022 yang hanya sebesar Rp26.004. Garis kemiskinan yang semakin meningkat dengan diikuti penurunan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik makanan maupun non makanan semakin baik.

Persentase tingkat kemiskinan (P0) Kota Manado selama kurun waktu 2018-2023 cenderung berfluktuasi. Tingkat kemiskinan Kota Manado di tahun 2023 adalah sebesar 5,79%, yang berarti dari 100 penduduk Kota Manado di Tahun 2023 terdapat 5 hingga 6 orang yang berstatus miskin. Angka ini turun tipis 0,06 poin dari tahun 2022 (5,85%). Namun relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Sulawesi Utara (7,38%) dan Nasional (9,36%).

Asumsi menurunnya jumlah penduduk miskin ditahun 2023 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun di antara anggota masyarakat sendiri. Program-program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah telah membuka lapangan kerja bagi penduduk miskin yang berdampak pada terciptanya pendapatan, program peningkatan akses layanan infrastruktur baik pemenuhan kebutuhan penduduk miskin akan hunian yang layak, sanitasi, air dan listrik, adanya peningkatan pelayanan terhadap aspek pendidikan dan keterampilan,

peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, program pemberdayaan sektor UKM untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin, serta upaya untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

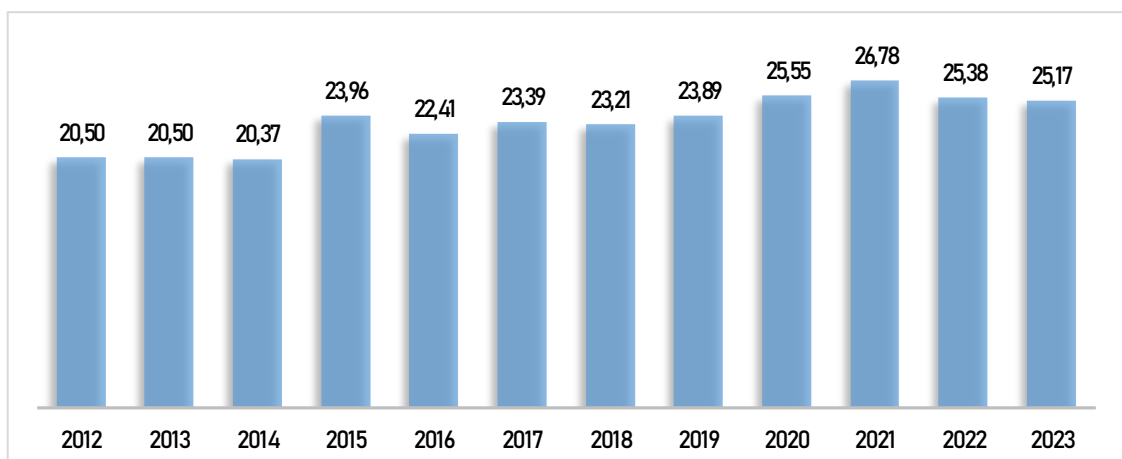
Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen)



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Penurunan persentase penduduk miskin diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Manado tahun 2023 sebanyak 25,17 ribu jiwa, dibandingkan tahun 2022 sebanyak 25,38 ribu jiwa. Artinya dibandingkan dengan 2022, sekitar 210 jiwa telah terangkat status kesejahteraannya menjadi tidak miskin pada tahun 2023.

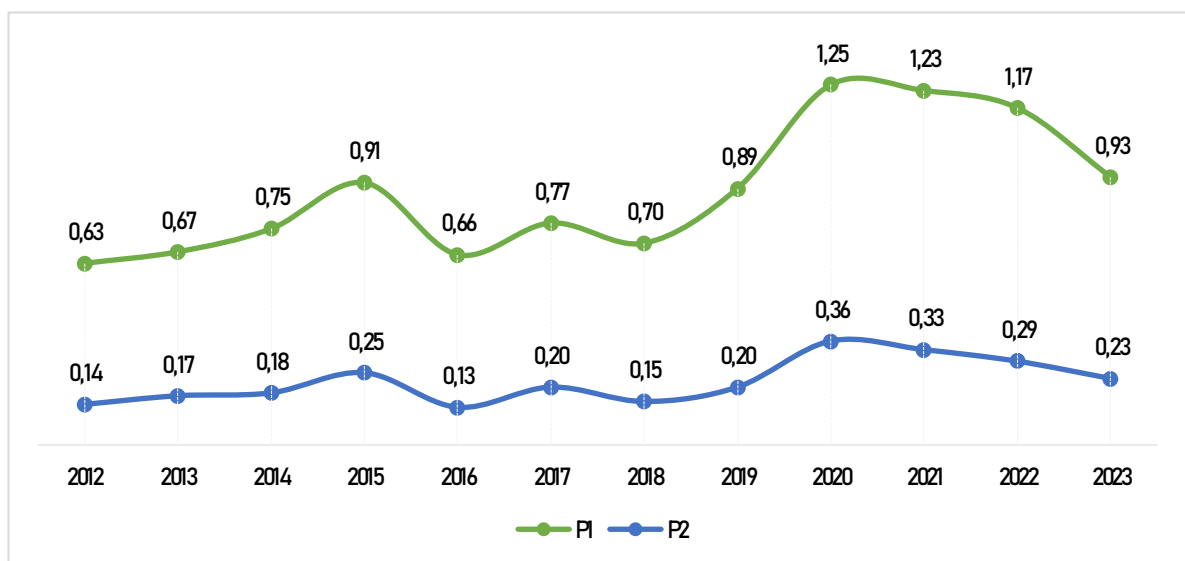
Gambar 2.6. Jumlah Penduduk Miskin Kota Manado Tahun 2012– 2023 (ribu orang)



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan sebaliknya semakin rendah nilai P1, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks, semakin merata pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Manado Tahun 2012– 2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

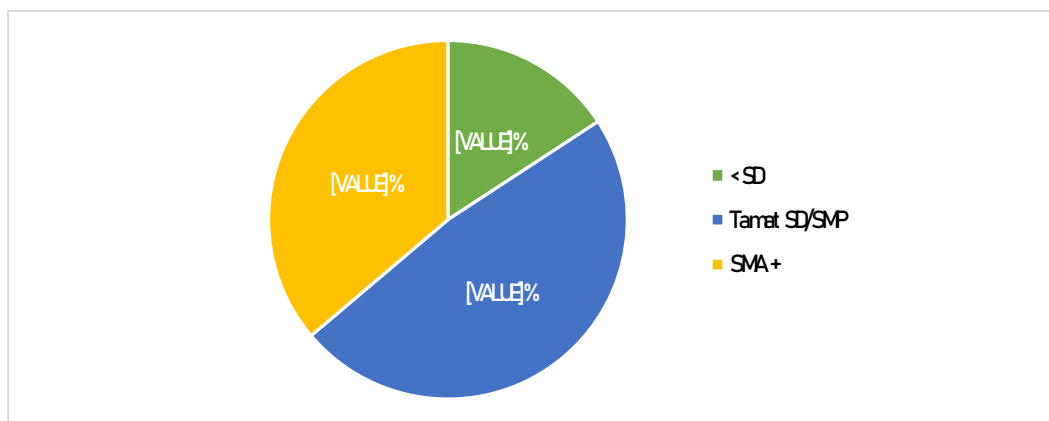
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Manado tahun 2023 mengalami penurunan 0,24 poin dari 1,17 (2022) menjadi 0,93 (2023). Artinya bahwa di tahun 2023, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan kondisi perekonomian penduduk miskin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Menurunnya P1 menunjukkan adanya peningkatan daya beli pada penduduk miskin sebab tingkat pengeluaran penduduk miskin memiliki tren atau cenderung mendekati garis kemiskinan. Asumsi penurunan P1 antara lain: a) Tersalurnya program bantuan sosial dan jaminan sosial; b) Adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal yang

berdampak pada peningkatan penghasilan; serta c) tingkat inflasi yang masih terjaga terutama harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Sejalan dengan indeks Kedalaman Kemiskinan, indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Manado pada tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 0,23, turun 0,06 poin dari tahun 2022. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Manado mengalami penurunan. Menurunnya P2 menunjukkan bahwa 40% penduduk kelas bawah di Kota Manado telah mengalami pergeseran dalam ketimpangan distribusi pendapatan yang berimplikasi semakin menyempitnya ketimpangan/kesenjangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin untuk kebutuhan hidupnya baik yang primer maupun sekunder. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapatan yang diperoleh yang berimplikasi pada ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, di tahun 2023 penduduk miskin yang berusia 15 tahun ke atas didominasi penduduk dengan latar belakang pendidikan SD/SMP sebanyak 48,03%, diikuti pendidikan SMA ke atas sebanyak 36,19% dan sisanya berada pada kelompok tidak tamat SD sebanyak 15,78%.

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kota Manado, 2023

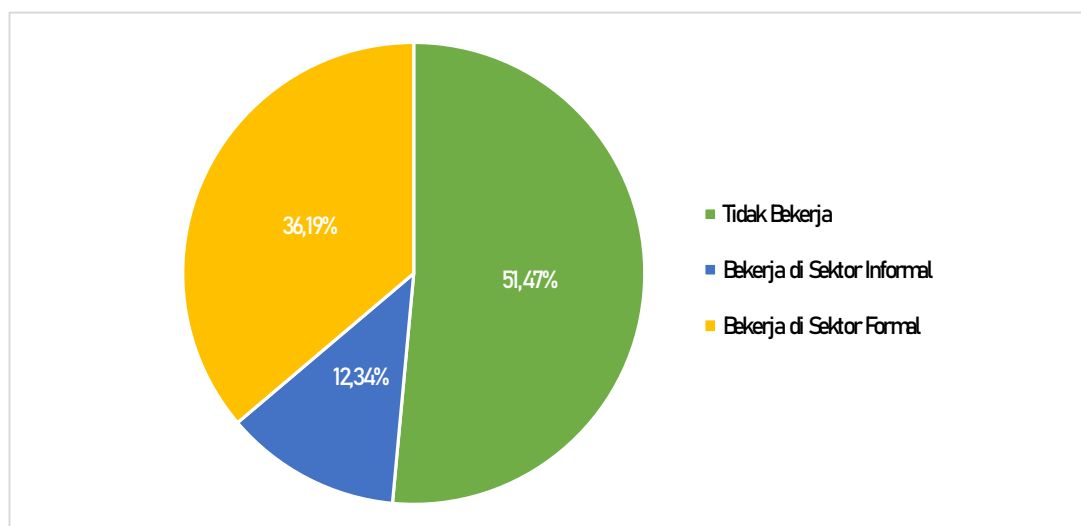


Sumber: BPS Kota Manado 2024

Ketenagakerjaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Penduduk yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor formal cenderung berada di atas garis kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pada sektor formal lebih stabil. Sebaliknya, karakteristik penduduk yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor informal

biasanya cenderung lebih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2023, sebanyak 51,47% mayoritas penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kota Manado tidak bekerja. Kategori tidak bekerja yang dimaksud adalah penduduk yang termasuk dalam pengangguran dan bukan angkatan kerja (penduduk sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya). Kemudian, terdapat 36,19% penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal, dan 12,34% di sektor informal. Fenomena ini sedikit berbeda, di mana biasanya penduduk miskin selalu lebih banyak menggeluti sektor informal dibanding formal. Hal ini bisa diakibatkan karena lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Manado, lebih didominasi oleh sektor formal.

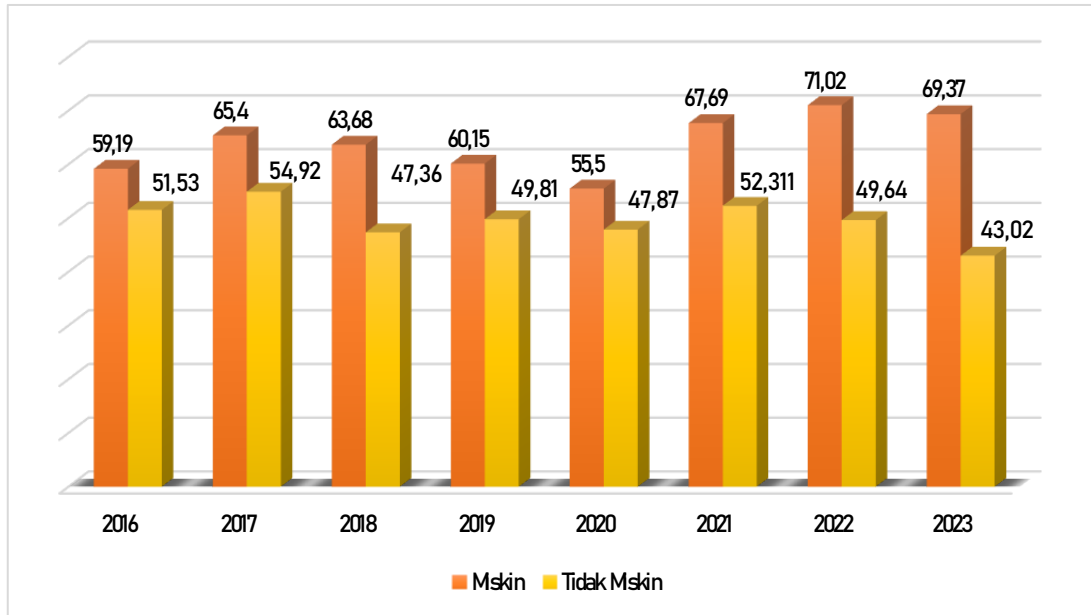
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Kota Manado, 2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Berdasarkan data, sejak tahun 2016, meskipun nilainya berfluktuasi, persentase pengeluaran per kapita untuk komoditas makanan pada penduduk miskin selalu lebih besar dari penduduk yang tidak miskin dan selalu melebihi angka 50%. Artinya, pengeluaran penduduk miskin untuk makanan selalu lebih besar daripada non makanan. Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan pangan lebih diutamakan oleh penduduk miskin dan tidak memiliki sisa yang banyak untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Gambar 2.10 Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan pada Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Kota Manado, 2016-2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Pada tahun 2023, sebanyak 88,78% rumah tangga miskin sudah menggunakan air layak dan 11,22% rumah tangga miskin yang belum menggunakan air layak. Terdapat 94,77 rumah tangga miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri/bersama, sedangkan 5,27 rumah tangga miskin belum/tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama.

Target penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Manado tahun 2024 adalah sebagai berikut:

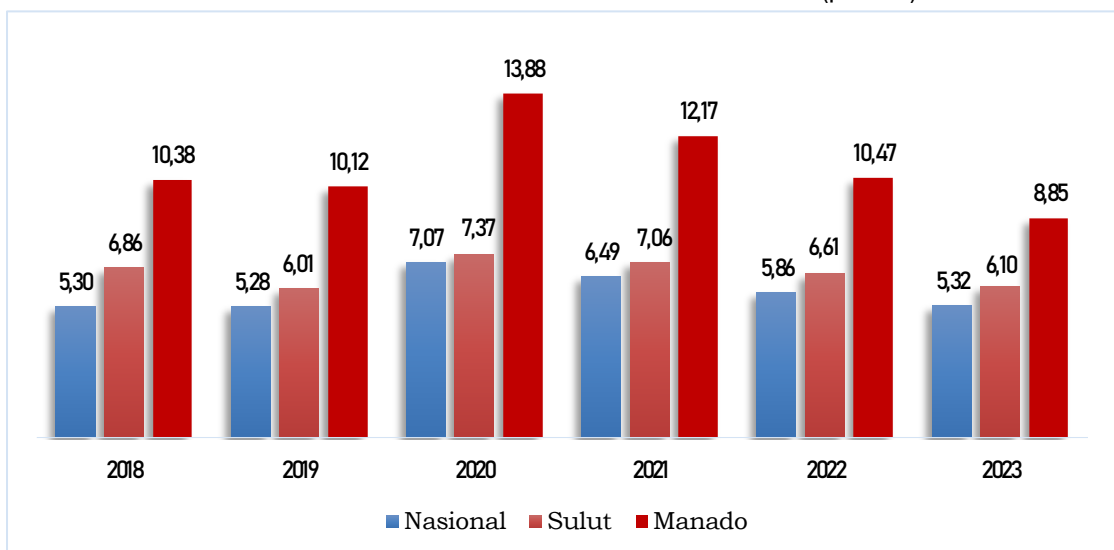
- Penurunan angka kemiskinan Kota Manado tahun 2024 pada RKPD Perubahan 2024 dengan target yaitu 5,43%.
- Penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Manado tahun 2024, sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pencapaian SDGs adalah menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 0% (nol persen) pada tahun 2024, sesuai Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022. Berdasarkan hasil pemurnian tahun 2023 (Kepwal No.451/KEP/02/SETDAKO/2023) jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Manado tahun 2023 berjumlah 474 jiwa, dan yang sudah dientaskan di tahun 2023 sebanyak 234 jiwa, sedangkan dalam proses pengentasan tahun 2024 sebanyak 240 jiwa. Target penghapusan penduduk miskin ekstrem 0% ditahun 2024 menjadi tantangan pemerintah daerah Kota Manado, sehingga perlu dilakukan akurasi data dan sinergi antar program yang melibatkan seluruh lintas sektor, dengan strategi kebijakan meliputi: 1) Penurunan beban pengeluaran penduduk miskin ekstrem; 2) Peningkatan pendapatan penduduk miskin ekstrem; serta 3)

Pengurangan/penurunan kantong-kantong kemiskinan. Berikut adalah skenario penghapusan penduduk miskin ekstrem 0% ditahun 2024 berdasarkan 14 indikator kemiskinan BPS.

e. Tingkat Pengangguran

Penyerapan tenaga kerja membuat kondisi ketenagakerjaan Kota Manado tahun 2023 menunjukkan perbaikan. Hal ini mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPT Kota Manado di tahun 2023 menurun sebesar 1,62 poin yaitu dari 10,47% di tahun 2022 menjadi 8,85% di tahun 2023. TPT Kota Manado sebesar 8,85% dapat diinterpretasikan secara umum bahwa dari 100 penduduk yang masuk dalam angkatan kerja terdapat 8 sampai 9 orang yang menganggur. Penurunan angka TPT di tahun 2021 - 2023 mengindikasikan semakin terbukanya lapangan kerja baru yang berdampak pada kenaikan penyerapan lapangan kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Manado dari tahun 2021 ke tahun 2023 cenderung mengalami penurunan.

Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Manado dan Perbandingannya dengan Sulawesi Utara dan Indonesia Tahun 2018 - 2023 (persen)



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja Kota Manado berjumlah 356.129 orang, yang terbagi atas angkatan kerja 218.206 orang (61,27%) dan yang bukan angkatan kerja atau penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, sebanyak 137.923 orang (38,73%). Angkatan kerja sebanyak 218.206 orang atau 61,27% menandakan dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 61 orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau aktif secara ekonomi. Nilai angkatan kerja tahun 2023 menjadi 218.206

orang mengalami peningkatan dari tahun 2022 (203.388 orang), dengan rincian penduduk yang bekerja sebanyak 91,15% dan sisanya sebesar 8,85% merupakan penduduk yang menganggur.

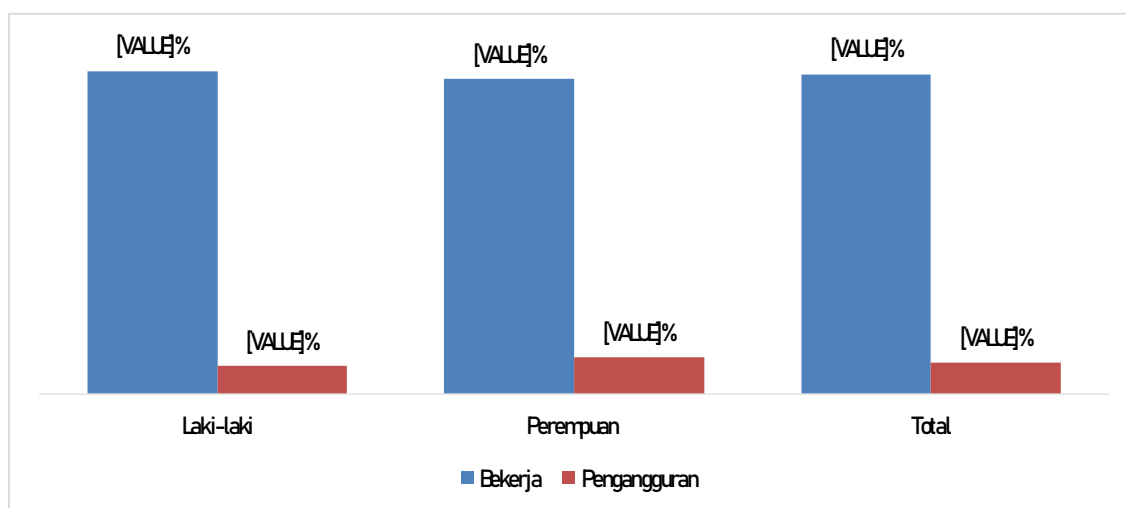
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Manado Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Angkatan Kerja	132.757	60,84	85.449	39,16	218.206	61,27
Bekerja	122.243	92,08	76.652	89,70	198.895	91,15
Pengangguran	10.514	7,92	8.797	10,83	19.311	8,85
Bukan Angkatan Kerja	44.816	32,49	93.107	67,51	137.923	38,73

Sumber: BPS Kota Manado 2024

Ditinjau dari jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang bekerja berjumlah 122.243 orang (92,08%), lebih besar daripada penduduk perempuan bekerja yang berjumlah 76.652 orang (89,70%). Namun perbedaan penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan cukup kecil. Sedangkan persentase penduduk laki-laki yang menganggur berjumlah 10.514 orang (7,92%) lebih rendah dibanding penduduk perempuan yang menganggur sebanyak 8.797 orang (10,30%).

Gambar 2.12 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Manado Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

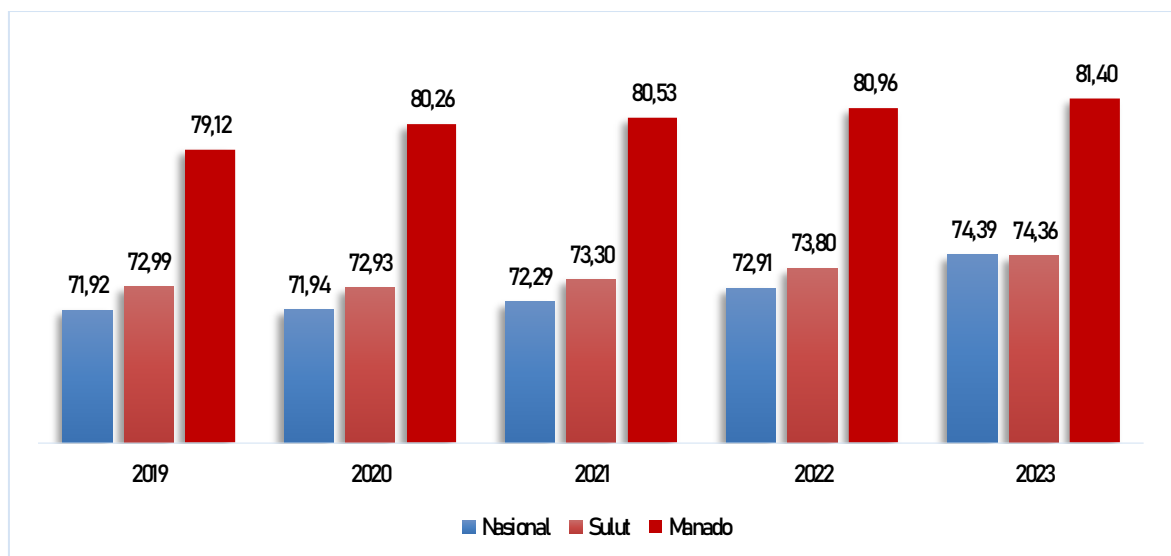
Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan di tahun 2023, tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SMA masih menjadi porsi terbesar pekerja di Kota Manado yaitu 29,30%, kemudian 18,06% penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan Universitas,

15,31% penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tidak/belum pernah sekolah atau tidak/belum/tamat SD atau SD, 14,26% penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan SMP, 12,66% penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan SMK, dan 1,56% penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan Diploma I/II/III. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di Kota Manado tergolong masih rendah.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tahun 2020, status pembangunan manusia Kota Manado berada pada level “sangat tinggi”, dan berada di atas Sulawesi Utara dan Nasional. IPM Kota Manado pada tahun 2023 tercatat sebesar 81,40 atau tumbuh sebesar 0,44 poin jika dibandingkan IPM tahun 2022 yang sebesar 80,96. Peningkatan IPM Kota Manado didorong oleh kenaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita.

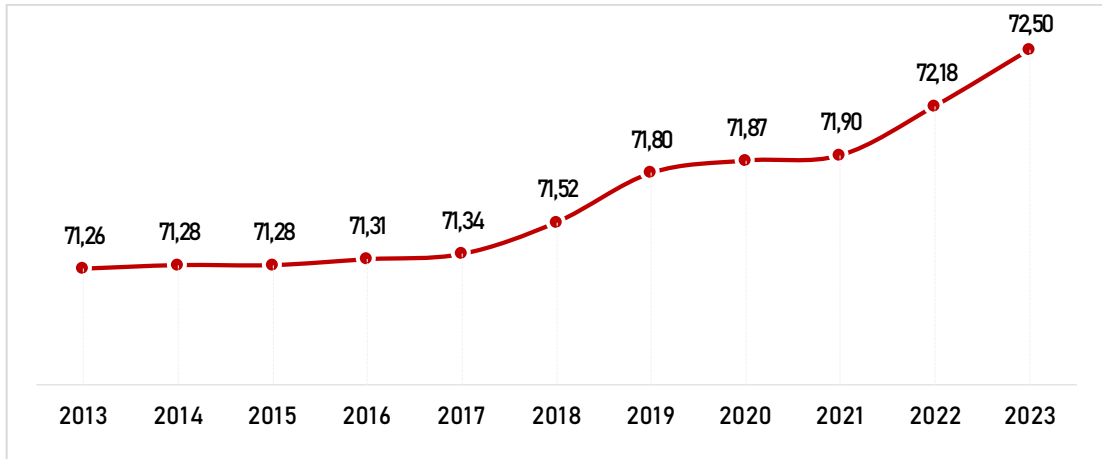
Gambar 2.13. IPM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

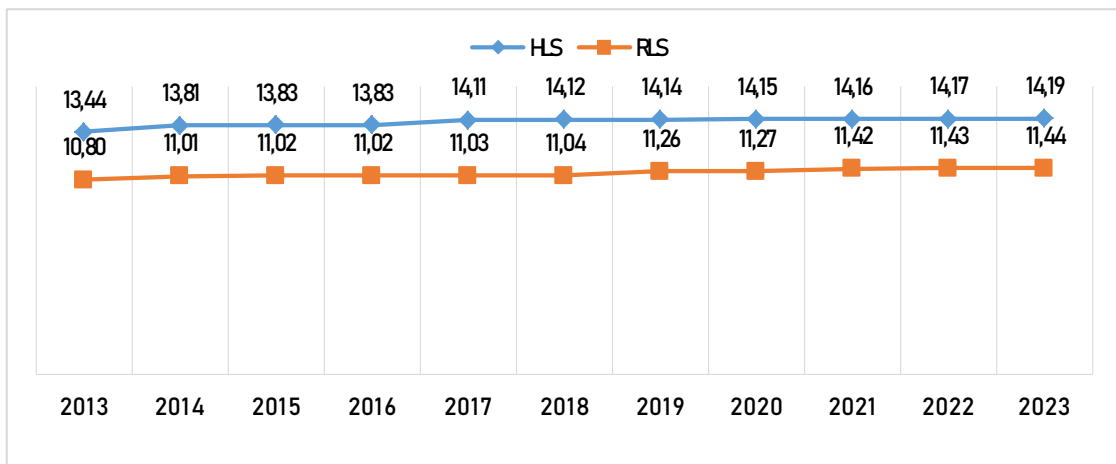
Peningkatan indikator pembentuk IPM secara berturut turut yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) sebesar 72,50; Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,19; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 11,44; dan Pengeluaran per Kapita yang tercatat tumbuh dari Rp14,40 juta pada 2022 menjadi Rp14,82 juta pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan sinyal yang baik bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup di Kota Manado

Gambar 2.14 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Manado Tahun 2013-2023



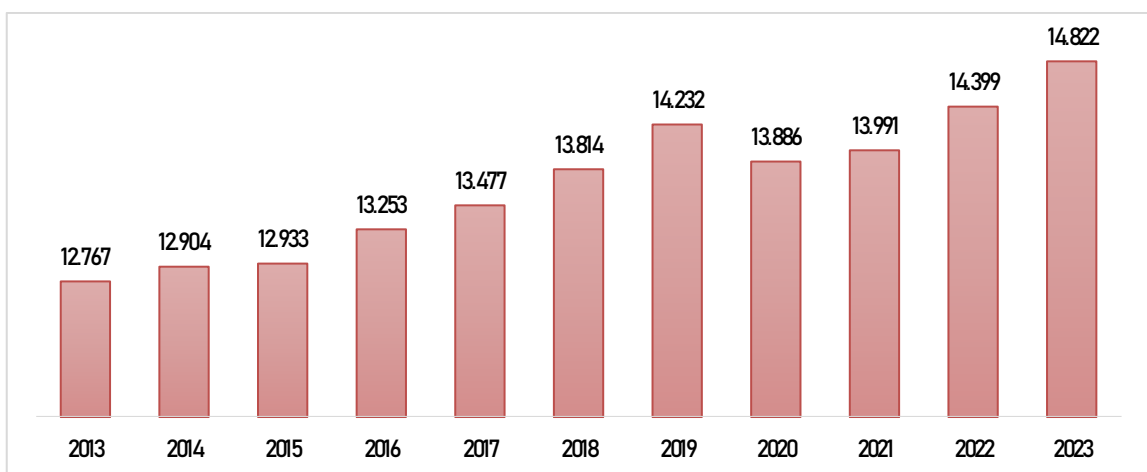
Sumber: BPS Kota Manado 2024

Gambar 2.15 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Manado Tahun 2013-2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Gambar 2.16 Pengeluaran Riil per kapita yang disesuaikan (PPP) Kota Manado Tahun 2013-2023 (Rp.000)



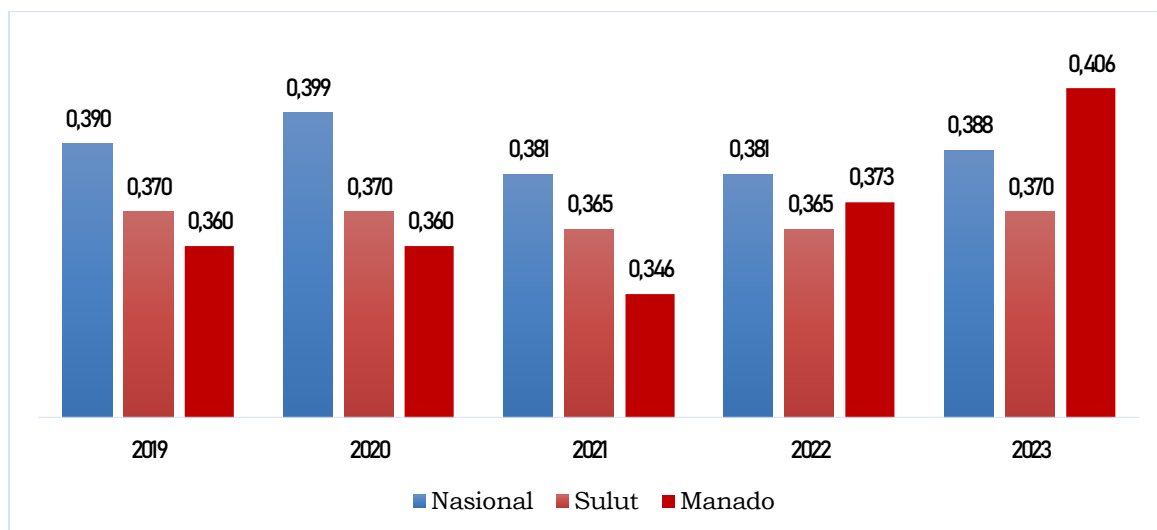
Sumber: BPS Kota Manado 2024

Proyeksi target IPM Kota Manado tahun 2024 berada diangka 81,78-82,15, dengan program: 1) Peningkatan layanan kesehatan; 2) Peningkatan layanan pendidikan melalui upaya agar seluruh penduduk usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan 12 tahun; serta 3) Peningkatan daya beli masyarakat.

g. Gini Ratio

Tren indeks gini Kota Manado tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terlihat cenderung meningkat. Di tahun 2023, indeks gini Kota Manado berada diangka 0,406. Indeks tersebut berada diatas capaian provinsi yang sebesar 0,370. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di Kota Manado termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat Kota Manado berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk. Diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati oleh masyarakat berpendapatan rendah dan hanya dinikmati oleh masyarakat dengan pendapatan tinggi. Asumsi lainnya bahwa masyarakat lapisan bawah lebih lambat beradaptasi terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dibandingkan masyarakat lapisan atas.

Gambar 2.17 Gini Ratio Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Manado 2024

Proyeksi target gini ratio Kota Manado tahun 2024 yaitu 0,380 sesuai target RPJMD 2024, dengan program: 1) Peningkatan iklim investasi yang akan berdampak pada pemerataan infrastruktur dan pendapatan masyarakat; 2) Pemberdayaan UMKM; 3) adanya pergeseran dari industri padat modal menjadi padat karya; 3) Inflasi terkendali; dan 4) Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang tepat sasaran.

Prospek perekonomian Kota Manado tahun 2024 masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Perekonomian global dan perekonomian nasional masih berada pada ketidakpastian yang masih tinggi di tahun 2023, seiring dengan peningkatan geopolitik Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda akan berakhir, dan berdampak pada risiko gangguan mata rantai global yang berdampak pada pasokan pangan dan energi. Berbagai negara menunjukkan perkembangan ekonomi dan inflasi yang menunjukkan indikasi semakin kuat bahwa risiko stagflasi semakin dekat. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global yang lambat disertai dengan inflasi yang sudah cukup tinggi terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Selain isu strategis di atas, isu global yang menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Manado yaitu isu SDGs, revolusi 4.0, serta isu perubahan iklim.

Walaupun ekonomi Indonesia sedang dihadapi oleh isu global, kinerja ekonomi Indonesia diperkirakan relatif cukup tangguh terhadap risiko perlambatan di tahun 2024, dengan ditopang oleh menguatnya permintaan domestik dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja positif mayoritas lapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun demikian, tahun 2024 sebagai tahun politik akan berdampak pada perkembangan investasi Indonesia yang bisa menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu untuk menjaga kestabilan politik agar iklim investasi tetap kondusif. Tren investasi ke depan akan lebih pada sektor pariwisata, dimana Indonesia sudah memasuki era *next normal* dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur dan proyek investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon sesuai isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dari sisi regional, isu strategis Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

- a. Kondisi global dan nasional yang berkaitan dengan isu SDGs, geopolitik global dan isu *climate change*.
- b. Isu implementasi transformasi ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, pengembangan destinasi pariwisata prioritas, penguatan ekonomi kreatif dan digital.
- c. Mewujudkan pembangunan yang merata.
- d. Pembangunan SDM yang sehat, produktif dan berdaya saing, yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.
- e. Sumber pembiayaan yang terbatas.

- f. Sukses pemilu.
- g. Pembangunan yang merata berwawasan lingkungan secara fisik, sosial dan ekonomi.

Isu-isu strategis regional tersebut diselaraskan dengan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Manado ditahun 2024. Pemerintah Kota Manado dengan mengusung tema pembangunan tahun 2024 “Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Meningkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu”, dengan prioritas pembangunan: 1) Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Kota; 2) Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi; 4) Pengurangan Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim; dan 5) Peningkatan Digitalisasi Tata Kelola Birokrasi dan Optimalisasi PAD.

Target perekonomian makro tahun 2024 dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan capaian indikator ekonomi makro ditahun 2021 dan 2022, faktor internal dan faktor eksternal serta proyeksi ekonomi global. Asumsi tantangan dan prospek yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian Kota Manado ditahun 2024 antara lain:

- a. Potensi ancaman resesi global dan nasional yang masih membayangi perekonomian global, nasional dan daerah.
- b. Pencapaian target SDGs.
- c. Tantangan era revolusi 4.0.
- d. Tahun 2024 sebagai tahun politik yang akan mempengaruhi iklim berinvestasi.
- e. Isu perubahan iklim atau pemanasan global.
- f. Potensi gangguan bencana cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa.
- g. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, diantaranya yaitu adanya arus migrasi dan urbanisasi dengan tujuan mencari pekerjaan yang akan menjadi pesaing bagi tenaga kerja lokal.
- h. Sumber pembiayaan bagi pembangunan kota yang terbatas.
- i. Berdasarkan prediksi, walaupun pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di 2023 tetapi akan membaik di 2024, dengan tekanan inflasi global yang diperkirakan akan menurun (sumber: WEO IMF, April 2023).
- j. Potensi Kota Manado dari sisi lokasi sebagai pintu gerbang Sulawesi Utara dan Indonesia ke Kawasan Asia Pasifik.
- k. Arus investasi asing melalui PMA dan PMDN akan terus meningkat pada 2024 seiring dengan pengembangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Trend investasi akan

terus berkembang pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur, pariwisata serta sektor UMKM.

- l. Sektor pariwisata diperkirakan sudah kembali pulih pada 2024, dengan adanya inovasi yang berkelanjutan dalam pariwisata dan transportasi serta berkembangnya infrastruktur dan investasi yang didukung dengan KEK Likupang sebagai super prioritas pariwisata nasional dan DPP Manado – Likupang.
- m. Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis Kota Manado sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Manado – Likupang.
- n. Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Manado sebagai Wilayah Metropolitan (WM).

Dengan memperhatikan tren dan tantangan yang ada di Kota Manado serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka proyeksi indikator ekonomi makro Kota Manado tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Manado Tahun 2022-2024

Indikator Makro	2022			2023			2024		
	Target RPJMD	Target RKPD	Capaian	Target RPJMD	Target RKPD Perubah	Capaian	Target RPJMD	Target RKPD	Target RKPD Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,0-4,0	2,0-3,0	5,64	4,0-5,0	6,112,	5,52	6,0-7,0	6,5-7,0	5,55-6,00
Pendapatan per kapita (juta Rp)	85,52	85,82	96,61	88,39	105,99	105,88	91,04	115,37	110-115
Inflasi (%)	2,0-3,0	2,0-3,0	4,00	2,0-3,0	3,00±1	2,87	2,00-3,00	2,00±1	2,00±1
Kemiskinan (%)	5,85	5,85	5,85	5,5-5,6	5,50	5,79	5,45-5,50	5,45	5,43
Pengangguran (%)	12	12,00 ±1	10,47	11,00-12,00	9,30	8,85	10,00-11,00	8,13	8,13
IPM	79,41	79,51	79,66	79,69	80,00	81,40	80,03	80,25	81,78-82,15
Rasio Gini	0,350	0,350	0,373	0,350	0,350	0,406	0,350	0,350	0,380
Indeks Risiko Bencana	105	105	90,96	100	90	83,38	90	90	88
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,2	56,2	57,86	60	60	60,14	60	60	60,14-65,14

Asumsi pencapaian target indikator makro pembangunan Kota Manado tahun 2024

yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kota Manado tahun 2024 ditargetkan antara 5,55 – 6,00%. Asumsi prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 antara lain: adanya peningkatan komponen investasi untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, selain adanya efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Walaupun ada resiko perlambatan ekonomi akibat ancaman resesi ekonomi yang akan berimbas juga ditahun 2024, serta tahun 2024 sebagai tahun politik.
- 2) PDRB per kapita ditargetkan berada pada angka Rp. 110 juta – Rp.115 juta.
- 3) Tingkat inflasi tahun 2024 ditargetkan dapat dikendalikan pada kisaran $2,00 \pm 1\%$ sesuai target RPJMD Kota Manado tahun 2024. Walaupun diperkirakan pertumbuhan global masih melambat ditahun 2023 tetapi akan membaik di 2024, diikuti dengan tekanan inflasi global yang juga diperkirakan menurun (sumber: WEO IMF, April 2023). Langkah-langkah pengendalian inflasi yang perlu dilakukan yaitu antara lain: a) Dilakukan intervensi pengendalian pada komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (khususnya tarif listrik, PDAM, tarif angkutan kota, bahan bakar minyak dan tarif cukai rokok); b) Pengendalian komponen inflasi *volatile food*, dari potensi gangguan ketersediaan pasokan pangan akibat faktor cuaca dan ketergantungan pasokan dari luar Manado; c) Menjaga stabilisasi harga/pengendalian harga melalui operasi pasar secara kontinyu; d) Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk tidak melakukan *panic buying* (pembelian secara berlebihan atau melakukan penimbunan barang); serta e) Menjaga ekspektasi positif masyarakat.
- 4) Target kemiskinan tahun 2024 ada diangka 5,43%. Target berdasarkan capaian triwulan II dirilis berada diangka 5,43% (capaian Maret 2024). Sedangkan target kemiskinan ekstrem yaitu 0% ditahun 2024. Untuk penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Manado tahun 2024, berdasarkan hasil pemurnian tahun 2023 (Kepwal No.451/KEP/02/SETDAKO/2023) jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Manado tahun 2023 berjumlah 474 jiwa, dan yang sudah diantaskan di tahun 2023 sebanyak 234 jiwa, sedangkan dalam proses pengentasan tahun 2024 sebanyak 240 jiwa. Asumsi target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu:
 - a) Adanya pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan program terhadap layanan dasar infrastruktur, peningkatan layanan dasar kesehatan, peningkatan layanan dasar pendidikan, serta peningkatan pendapatan melalui pergeseran industri padat modal ke padat karya dan penurunan beban pengeluaran penduduk miskin melalui pemberdayaan UKM dan koperasi, akses pelatihan dan ketrampilan, kemudahan akses terhadap pasar kerja, modal dan kewirausahaan,

- penajaman target pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial, pelaksanaan pasar murah pada kantong-kantong kemiskinan; serta stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui inflasi yang terjaga;
- b) Dilakukannya pemutakhiran DTKS;
 - c) Adanya program KB bagi keluarga miskin melalui akses pelayanan dan ketersediaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk pada penduduk miskin;
 - d) Peningkatan peran perempuan dalam keluarga disektor informal melalui aktivitas industri rumahan;
 - e) Adanya kebijakan/program bagi masyarakat rentan miskin yang pengeluarannya mulai berada di atas GK terhadap guncangan internal (terkena PHK, kepala keluarga menderita sakit atau meninggal dunia) maupun guncangan eksternal karena adanya bencana alam dan lain-lain. Semua program yang dilaksanakan harus dilakukan secara integrasi antar lintas sektor baik pemerintah, BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat, serta integrasi dalam pendanaan baik APBN, APBD, BUMN/BUMD maupun swasta.
- 5) Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditahun 2024 ditargetkan diangka 8,13% mengingat capaian tahun sebelumnya ada diangka 8,85%, dengan asumsi: a) Tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak; b) Adanya pemberdayaan sektor UKM; c) Adanya pelatihan yang relevansi dengan kebutuhan kesempatan kerja dan bersertifikat; d) Peningkatan iklim investasi dan berusaha di Kota Manado terhadap sektor-sektor potensial untuk meningkatkan akses pencari kerja; e) Adanya kebijakan penggunaan tenaga kerja yang mengutamakan pekerja dengan KTP Manado; serta f) Menjaga kestabilan inflasi.
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 diperkirakan akan berada pada poin 81,78-82,15, dengan proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) pada kisaran angka 72,40; Harapan Lama Sekolah (HLS) lebih besar 14,18; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) lebih besar 11,44 dan Pengeluaran per Kapita lebih besar Rp.14.800,00 ditahun 2024. Prediksi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 didasarkan pada asumsi: a) Terjadinya peningkatan manajemen pelayanan kesehatan; b) Terjadinya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan; dan c) Peningkatan daya beli masyarakat.
- 7) Prediksi penurunan rasio Gini pada angka 0,380. Hal ini didasarkan pada capaian tahun

2023 yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu diangka 0,406. Perbaikan ekonomi pada tahun 2024 diharapkan selaras dengan prediksi perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, sehingga mampu menekan angka ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan mampu menjangkau semua golongan pendapatan, baik golongan 20% masyarakat berpendapatan tinggi, 40% masyarakat berpendapatan menengah dan 40% masyarakat berpendapatan rendah. Penurunan tersebut didasarkan pada asumsi: a) Terjadi peningkatan iklim investasi dan berusaha di Kota Manado, yang akan berdampak pada pemerataan infrastruktur dan pendapatan masyarakat; dan b) Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan pemerintah tepat sasaran; 3) Pemberdayaan UMKM; 4) peralihan dari industri padat modal menjadi padat karya; serta 5) Inflasi terkendali.

Berikut matriks pembangunan indikator makro Kota Manado yang terdiri dari asumsi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan indikator makro, solusi, program dan perangkat daerah yang terkait dalam pencapaian target pembangunan indikator makro Kota Manado tahun 2024.

Tabel 2.5. Matriks Pembangunan Indikator Makro Kota Manado

Indikator Makro	Penyebab	Solusi	Program	Perangkat Daerah
1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB per Kapita	<ul style="list-style-type: none"> Melambatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah yang tidak optimal, bertambahnya jumlah pengangguran, melambatnya kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ekonomi pada sektor-sektor unggulan Kota Manado yaitu sektor perdagangan, jasa dan pariwisata untuk menciptakan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi sektor lainnya Peningkatan investasi Pemberdayaan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya Tarik dan pemasaran pariwisata, serta pengembangan Ekraf Peningkatan sarana distribusi perdagangan Pemberdayaan dan pengembangan UMKM Pengembangan iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata Disperindag Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bagian Perekonomian Diskop UMKM DPMPTSP
3. Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk miskin memiliki masalah permukiman, ketersediaan air bersih dan sanitasi Cenderung mempunyai status Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses layanan dasar infrastruktur Meningkatkan akses layanan dasar kesehatan Meningkatkan akses layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Hunian layak (Rusunawa/RTLH), sanitasi, Air bersih Peningkatan akses layanan kesehatan dan penajaman target program bantuan sosial KIS Peningkatan akses layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Perkim PUPR Dinkes Dinsos Diskop UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pertanian, Perikanan dan

Indikator Makro	Penyebab	Solusi	Program	Perangkat Daerah
	<p>yang rendah dan lebih rentan terhadap penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cenderung memiliki tingkat Pendidikan rendah • Keterbatasan ekonomi karena kesulitan mendapatkan pekerjaan • Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 	<p>dasar Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin • Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin 	<p>Pendidikan, penajaman target program bantuan sosial KIP, dan Program Pendidikan kesetaraan (Paket A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan UKM dan Koperasi, Akses terhadap pasar kerja, modal dan kewirausahaan, serta Akses pelatihan dan ketrampilan • Pemberian bantuan sosial, jaminan sosial (PKH, KIS, KIP, bantuan lansia, bantuan penyandang disabilitas) dan subsidi (listrik, LPG) 	<p>Kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disnaker
4. Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya lapangan pekerjaan • Kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan • Banyaknya pendatang dari luar Manado yang menjadi pekerja terutama di sektor konstruksi dan informal • Budaya malas dan memilih-milih pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan tenaga kerja fresh graduate yang siap terjun ke dunia kerja • Penyiapan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak • Melakukan pemberdayaan, pengembangan dan digitalisasi sektor UKM agar dapat meningkatkan akses pencari kerja untuk menjadi wirausaha atau pelaku UKM • Melaksanakan pelatihan ketrampilan bersertifikat yang relevansi dengan kebutuhan kesempatan kerja • Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan • Peningkatan kapasitas SDM • Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi • Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi • Pengelolaan informasi pasar kerja • Pengelolaan dan penyuluhan pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Disnaker • Diskop UMKM • Dinas Pariwisata • Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan • Dinas PUPR

Indikator Makro	Penyebab	Solusi	Program	Perangkat Daerah
		mengutamakan pekerja ber-KTP Manado		
5. Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> Inflasi yang rendah dan stabil menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Realisasi inflasi Kota Manado tahun 2022 diangka 4,00%, melewati target RPJMD 2022 diangka 2,00-3,00%, dan jika tetap berlanjut akan berdampak pada keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Intervensi pengendalian pada komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (khususnya tarif listrik, PDAM, tarif angkutan kota, bahan bakar minyak dan tarif cukai rokok) Pengendalian komponen inflasi <i>volatile food</i>, dari potensi gangguan ketersediaan pasokan pangan akibat faktor cuaca dan ketergantungan pasokan dari luar Manado Kelancaran distribusi barang Sosialisasi bijak belanja pada masyarakat untuk tidak melakukan <i>panic buying</i> Menjaga ekspektasi positif masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok Meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Disperindag Bagian Perekonomian
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada masyarakat yang putus sekolah (data 2022=APS 16-18 tahun masih berada pada angka 77,38) Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah hanya meningkat sebesar 0,01 tahun Pengangguran (realisasi 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan manajemen pelayanan Kesehatan melalui layanan posyandu dan poli lansia Mempersempit gap HLS dan RLS, melalui: upaya agar seluruh penduduk usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan 12 thn (setara lulus(SMA/K) Mendorong masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan pemenuhan masyarakat bidang Kesehatan Pengelolaan Pendidikan Program penempatan tenaga kerja bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan melalui ketersediaan lapangan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Dikbud Dinkes Diskop UMKM Disnaker Dispar Dinas PUPR Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Indikator Makro	Penyebab	Solusi	Program	Perangkat Daerah
	sebesar 8,85% atau 19.311 penganggur) akan mempengaruhi IPM karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, Pendidikan serta Kesehatan yang menjadi komponen IPM	<p>belum tamat SMA sederajat untuk dapat mengikuti program paket C (setara SMA/K);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah untuk menjadi sasaran utama dalam program pendidikan kesetaraan, melalui pendataan dan pendanaan yang tepat; • Sosialisasi pentingnya Pendidikan kepada masyarakat • Meningkatkan daya beli masyarakat 		
7. Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat gap/ketimpangan pada pengeluaran penduduk • Pembangunan infrastruktur memiliki peran terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan iklim investasi dan berusaha di Kota Manado, yang akan berdampak pada pemerataan infrastruktur dan pendapatan masyarakat • Program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan iklim penanaman modal • Penurunan Angka Kemiskinan • Penurunan Angka Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTSM • Perkim • PUPR • Dinkes • Dinsos • Diskop UMKM • Dinas Pariwisata • Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan • Disnaker

2.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan menjadi pedoman pemerintah selama 2024. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024 mengacu pada agenda RPJMD tahun 2021 – 2026. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam implementasi RKPD akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti APBN, hibah, kerjasama pemerintah dan dunia usaha, swadaya masyarakat, serta kontribusi dari pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pengelolaan keuangan daerah sudah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan direlevansikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah maka harus menyesuaikan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yaitu:

1. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.
2. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) meliputi BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga.
3. Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Selain itu Perubahan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya beberapa faktor berikut ini :

- Mengakomodir penajaman pelaksanaan program / kegiatan terkait prioritas pembangunan.
- Mengurangi kegiatan yang sudah tidak mendesak dan mengakomodir penajaman pelaksanaan program / kegiatan terkait Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- SiLPA serta hutang dari tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan.
- Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, yang salah satunya mengharuskan Pemerintah Kota Manado untuk melakukan perencanaan pendapatan daerah dengan lebih rasional dan terukur.
- Catatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat melakukan fasilitasi atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang menyoroti perencanaan pendapatan daerah yang perlu dilakukan rasionalisasi.

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga sampai pada akhir tahun anggaran 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sector riil.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari perencanaan yang menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan fokus pembangunan guna optimalisasi pencapaian tujuan. Arah kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran.

Dalam perumusan Perubahan RKPD tahun 2024, arah kebijakan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Manado dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado periode 2021 – 2026. Adapun visi pembangunan daerah Kota Manado berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026

**“Manado Maju dan Sejahtera sebagai
Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah Kota Manado adalah:

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Kota Manado
2. Misi 2: Penguatan Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Industri Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata
3. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur, Penataan Kota, dan Perluasan Konektivitas
4. Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
5. Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas antar Daerah

Visi dan misi pembangunan Kota Manado berdasarkan RPJMD 2021-2026 tersebut bermuara pada 15 program unggulan. Gambar 3.1 menyajikan capaian 15 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Manado.

Gambar 3.1 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Manado



Tema Pembangunan Kota Manado Tahun 2024 yaitu: **“Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Meningkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Kota 1: Peningkatan **Infrastruktur** dan **Penataan Kota**

Prioritas Kota 2: Peningkatan **Pendidikan**, **Kesehatan** dan **Kesejahteraan Masyarakat**

Prioritas Kota 3: Pertumbuhan dan Pemerataan **Ekonomi**

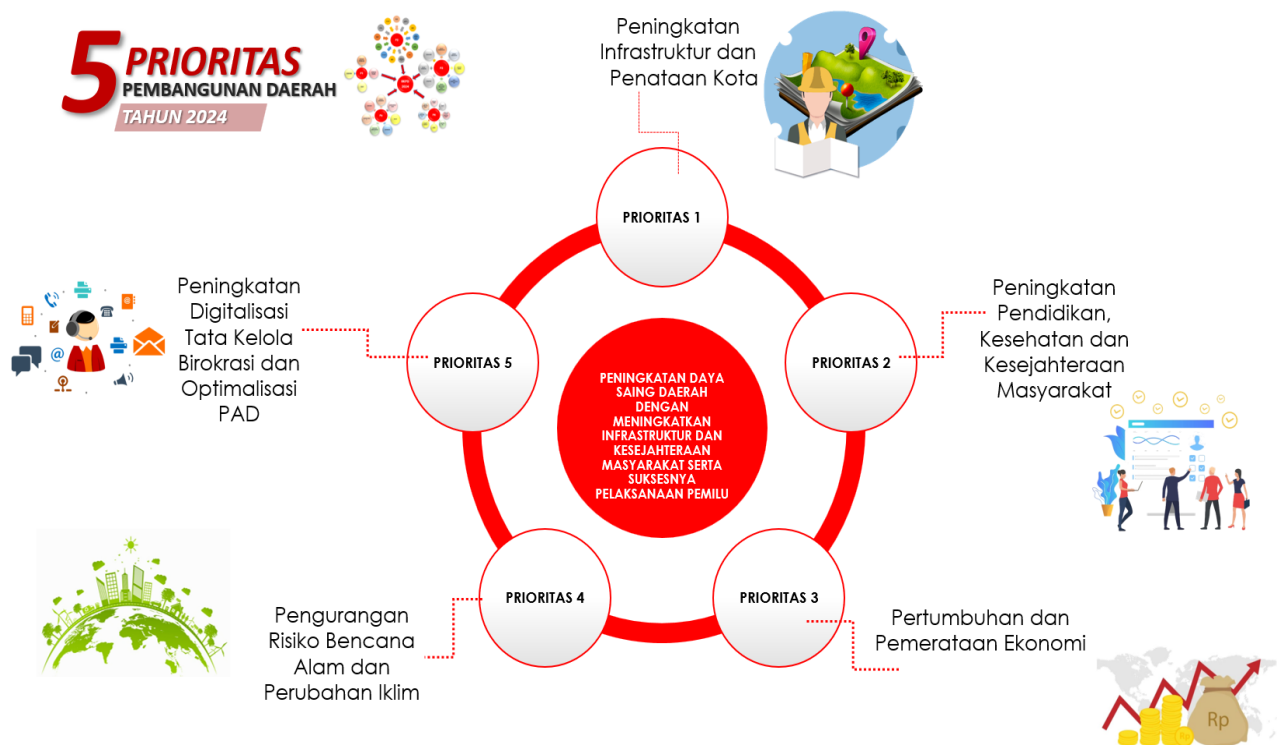
Prioritas Kota 4: Pengurangan Risiko **Bencana Alam** dan **Perubahan Iklim**

Prioritas Kota 5: Peningkatan Digitalisasi **Tata Kelola** Birokrasi dan **Optimalisasi PAD**

Pada Perubahan RKPD Kota Manado Tahun 2024, terdapat perubahan prioritas pembangunan pada Prioritas Kota 3 yaitu dari Peningkatan Stabilitas Perekonomian dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi menjadi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Pertimbangan adanya perubahan karena capaian permasalahan dan isu strategis pada Prioritas 3 Peningkatan Stabilitas Perekonomian dalam Mengantisipasi Ancaman Resesi, dengan indikator tingkat inflasi Kota Manado di tahun 2022 yang berada diangka 4,00%, di tahun 2023

sudah mencapai target yaitu berada diangka 2,87%. Sedangkan perumusan Prioritas Kota pada Perubahan RKPD 2024 yaitu Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan didasarkan pada kondisi capaian indikator Gini Ratio yang mengalami peningkatan di tahun 2023 diangka 0,406 dari 0,373 (2022) dan berada diatas capaian provinsi (0,370) dan nasional (0,388). Walaupun dari sisi nilai indeks, ketimpangan di Kota Manado masuk dalam kategori sedang (rentang 0,4-0,5), tetapi harus segera diantisipasi untuk tidak terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat Kota Manado. Selain peningkatan gini ratio, pertumbuhan ekonomi Kota Manado yang mengalami perlambatan dari 5,64% menjadi 5,52% menjadi prioritas pada Perubahan RKPD 2024.

Gambar 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Manado Tahun 2024



Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Manado Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar 5,55% - 6,00%
Target pertumbuhan ekonomi berubah dari target RPJMD 2024 diangka 6,0-7,0% menjadi 5,55-6,00%, mengingat capaian tahun 2023 (5,52%) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,12% dari tahun 2022 (5,64%)
- 2) Inflasi diangka 2,00±1%

- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,78 - 82,15
Target IPM berubah dari target RPJMD 2024 diangka 80,03 menjadi 81,78-82,15 mengingat capaian angka IPM tahun 2023 sudah diangka 81,40
- 4) Angka Kemiskinan sebesar 5,43%
Target kemiskinan berubah dari target RPJMD 2024 diangka 5,5 - 5,6% menjadi 5,43%, mengingat capaian angka kemiskinan Triwulan II tahun 2024 sudah diangka 5,43%
- 5) Jumlah Penduduk Miskin sebesar 24.070 jiwa.
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar (TPT) diangka 8,13%
Target TPT berubah dari target RPJMD 2024 diangka 10,00 - 11,00% menjadi 8,13%, mengingat capaian angka pengangguran tahun 2023 sudah diangka 8,85%.
- 7) Jumlah pengangguran sebanyak 18.361 jiwa
- 8) Pendapatan per Kapita sebesar Rp110-115 juta .
- 9) Rasio gini diangka 0,380.
Target rasio gini berubah dari target RPJMD 2024 diangka 0,350 menjadi 0,380, mengingat capaian rasio gini ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,406.
- 10) Indeks Risiko Bencana (IRB) diangka 88.
- 11) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diangka 60,14-65,14.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Manado sampai dengan Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2024, terutama dari sisi pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan Perubahan APBD Kota Manado Tahun 2024 diarahkan untuk Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, terutama jika memperhatikan capaian di tahun 2023 serta catatan-catatan dari BPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menegaskan tentang rasionalisasi pendapatan asli daerah secara terukur.

Sebagai informasi, data rancangan skema perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam dokumen Rancangan KUA-PPAS TA. 2024 masih menggunakan data yang diambil dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Perubahan Tahun 2024 di mana angka-angkanya masih sangat perlu untuk disesuaikan. Setelah dibahas dan disepakati bersama, maka rancangan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana diuraikan berikut.

4.2. Perubahan Target Pendapatan daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Memperhatikan perkembangan yang ada, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk target Pendapatan Daerah. Pajak Daerah disesuaikan dari Rp.452.000.000.000 menjadi Rp.445.000.000.000. Selain itu, Lain-lain PAD yang sah disesuaikan dari Rp.44.000.000.000 menjadi Rp.42.000.000.000. Dari kelompok Pendapatan Transfer, jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penyesuaian dari target Rp.130.774.546.778 menjadi Rp.123.853.256.673.

Tabel 4.1 Rencana Proyeksi Pendapatan Daerah APBD Perubahan TA. 2024

KODE REK	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2024		PERUBAHAN KUA PPAS TA 2024 HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPRD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		INDUK	RANCANGAN KUA PPAS PERUBAHAN TA 2024 (DPRD)		
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	530.945.600.000,00	521.945.600.000,00	521.945.600.000,00	(9.000.000.000,00)
4.101	Pajak Daerah	452.000.000.000,00	445.000.000.000,00	445.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)
4.102	Retribusi Daerah	29.945.600.000,00	29.945.600.000,00	29.945.600.000,00	-
4.103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
4.104	Lain-Lain PAD Yang Sah	44.000.000.000,00	42.000.000.000,00	42.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.206.696.634.024,00	1.199.801.083.663,00	1.199.801.083.673,00	(6.895.550.351,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.947.827.000,00	1.075.947.827.000,00	1.075.947.827.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.748.807.024,00	123.853.256.663,00	123.853.256.673,00	(6.895.550.351,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	39.774.546.778,00	39.774.546.778,00	39.774.546.778,00	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	39.774.546.778,00	39.774.546.778,00	39.774.546.778,00	-
	JUM LAH	1.777.416.780.802,00	1.761.521.230.441,00	1.761.521.230.451,00	(15.895.550.351,00)

Memperhatikan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa total Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.1.777.416.780.802, disesuaikan menjadi Rp.1.761.521.230.451.

Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pengkajian yang mendalam atas capaian riil jenis-jenis penerimaan. Pemerintah daerah juga akan terus mengupayakan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Terkait dengan rencana Perubahan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2024, di dokumen Rancangan KUA-PPAS TA. 2024 masih mengacu pada perencanaan sebagaimana tertuang dalam RKPD-P Tahun 2024, di mana perubahan belanja daerah disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas-prioritas mendesak lainnya. Terkait dengan perubahan ini, Belanja Daerah diarahkan agar lebih efisien di melalui pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, kegiatan, sub kegiatan, dan rekening belanja, dengan melakukan identifikasi atas rencana kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak akan lagi dilaksanakan (tanpa mempengaruhi kinerja dan pencapaian target SKPD), dan melakukan realokasi anggaran ke kegiatan-kegiatan yang memiliki urgensi yang lebih tinggi. Setelah dibahas, maka disepakati postur Belanja Daerah sebagaimana uraian berikut.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga

Jika mengacu pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024, Belanja Daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan APBD TA. 2024. Namun jika menelaah alokasi belanja serta memperhatikan realisasi Belanja Daerah hingga semester I, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan memperhatikan perkiraan rancangan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diangkat pada bab sebelumnya. Setelah dilakukan kajian serta pembahasan yang mendalam, maka telah diformulasikan suatu rancangan belanja daerah, di mana rancangan belanja daerah ini telah memperhitungkan *balance* antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Sedangkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tetap selaras dan mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2024. Bilamana dalam pelaksanaan APBD Perubahan TA. 2024 nanti target pendapatan yang telah disesuaikan kembali mengalami defisit, maka Pemerintah Kota Manado wajib untuk melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran dengan mengatur penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rancangannya serta perbandingannya dengan rencana perubahan belanja daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Rancangan Skema Belanja Daerah APBD Perubahan TA. 2024

KODE REK	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2024		PERUBAHAN KUA PPAS TA 2024 HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPRD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		INDUK	RANCANGAN KUA PPAS PERUBAHAN TA 2024 (DPRD)		
5.	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.447.207.576.757,00	1.456.918.363.086,00	1.451.906.544.115,00	4.698.967.358,00
5.1.01	Belanja Pegawai	696.270.914.404,00	674.304.753.801,00	665.994.347.064,57	(30.276.567.339,43)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.229.947.872,00	630.456.587.704,00	633.026.330.790,43	20.796.382.918,43
5.1.03	Belanja Bunga	21.121.000.000,00	14.600.000.000,00	14.621.000.000,00	(6.500.000.000,00)
4.3.05	Belanja Hibah	111.585.714.481,00	131.557.021.581,00	132.264.866.260,00	20.679.151.779,00
4.3.06	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
5.2	BELANJA MODAL	342.236.533.979,00	284.340.985.827,00	285.496.513.692,00	(56.740.020.287,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.788.831.913,00	6.788.831.913,00	6.845.895.000,00	57.063.087,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.102.748.001,00	52.623.155.999,00	57.726.640.899,00	6.623.892.898,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.094.019.115,00	136.978.062.965,00	126.795.470.720,00	8.701.451.605,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	163.165.111.297,00	84.565.111.297,00	90.892.683.420,00	(72.272.427.877,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.069.173.653,00	3.369.173.653,00	2.969.173.653,00	(100.000.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.650.000,00	16.650.000,00	266.650.000,00	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.052.670.066,00	2.821.933.341,00	6.678.224.457,00	(14.374.445.609,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.052.670.066,00	2.821.933.341,00	6.678.224.457,00	(14.374.445.609,00)
	JUMLAH	1.810.496.780.802,00	1.744.081.282.254,00	1.744.081.282.264,00	(66.415.498.538,00)

Berdasarkan hasil penyesuaian dan rasionalisasi belanja daerah, maka belanja daerah perlu disesuaikan dalam rancangan APBD Perubahan TA. 2024 menjadi sebesar Rp.1.744.081.282.264 dari sebelumnya sebesar Rp.1.810.496.780.802.

B A B VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk *Penerimaan Pembiayaan*, salah satu sumbernya adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dimana proyeksi perubahan APBD Tahun 2024 berdasarkan dokumen RKPD-P tahun 2024 sebesar Rp. 32.480.051.813, dari target sebelumnya sebesar Rp.5.000.000.000. Sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dihapus dari target sebelumnya sebesar Rp.80.000.000.000.

Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan perhitungan riil atas pembayaran cicilan pokok utang, dimana target awal sebesar Rp.46.920.000.000 disesuaikan menjadi Rp.44.920.000.000.

Untuk uraian perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini.

TABEL 6.1 Rancangan Pembiayaan Daerah Kota Manado Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024

KO DE REK	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2024		PERUBAHAN KUA PPAS TA 2024 HASIL PEMBAHASAN DENGAN DPRD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		INDUK	RANCANGAN KUA PPAS PERUBAHAN TA 2024 (DPRD)		
6.	BELANJA				
6.1	PENERIMAAN PEM B I A Y A A N	85.000.000.000,00	32.480.051.813,00	32.480.051.813,00	(52.519.948.187,00)
6.101	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	5.000.000.000,00	32.480.051.813,00	32.480.051.813,00	27.480.051.813,00
6.104	Penerimaan Pinjaman Daerah	80.000.000.000,00	-	-	(80.000.000.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	85.000.000.000,00	32.480.051.813,00	32.480.051.813,00	(52.519.948.187,00)
6.2	PENGELUARAN PEM B I A Y A A N	51.920.000.000,00	49.920.000.000,00	49.920.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.202	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
6.203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	46.920.000.000,00	44.920.000.000,00	44.920.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	51.920.000.000,00	49.920.000.000,00	49.920.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	PEM B I A Y A A N NETTO	33.080.000.000,00	(17.439.948.187,00)	(17.439.948.187,00)	(50.519.948.187,00)

B A B V I I

S T R A T E G I P E N C A P A I A N

Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan APBD Perubahan TA. 2024, diperlukan langkah-langkah strategis agar target-target dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dapat tercapai dan berdayaguna untuk mendorong pencapaian indikator-indikator makro pembangunan daerah tahun 2024.

Untuk Pendapatan Daerah, langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain :

- Pemanfaatan dan penguatan perda sebagai panduan,
- Mengidentifikasi potensi wajib pajak maka dapat menambah potensi wajib pajak yang lebih tinggi (optimal)
- Menggunakan media massa, elektronik dan media cetak sebagai sarana penyuluhan kepada masyarakat atau badan usaha tentang adanya perda yang diterbitkan tentang penyenggaraan pajak dan retribusi daerah.
- Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan strategi untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan memperhatikan :

- Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban ketepatan pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer.

- Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi; Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan untuk belanja daerah, Pemerintah Kota Manado akan berupaya agar optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah dapat maksimal pada tahun 2024 sesuai dengan kondisi penerimaan daerah, karena pemerintah beranggapan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah Kota Manado sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Manado.

Untuk strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Kota Manado Tahun 2024.

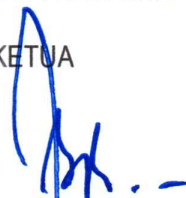
Strategi pencapaian target Pembiayaan dalam penyesuaian anggaran tahun 2024 dilakukan dengan menata sisa anggaran tahun sebelumnya serta dengan melakukan pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran cicilan pokok utang.

B A B V I I I
P E N U T U P

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2024.

PIMPINAN DPRD KOTA MANADO

KETUA



Apt. Dra. AALTJE DONDOKAMBEY, M.KES

WAKIL KETUA



MONA CLAUDYA KLOER, SH, MH

Manado, 18 September 2024



WALI KOTA MANADO,



ANDREI ANGOUW